



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN MENHUB, MEN PUPR, MENTERI
DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
SELASA, 29 JANUARI 2019**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Desa PDTT
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Selasa, 29 Januari 2019
Pukul	: 10.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (R KKV)
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, MSi
Acara	: Tindak lanjut HAPSEM BPK Semester I tahun 2018, evaluasi pelaksanaan APBN TA 2018, Lain-lain
Hadir	: orang, izin orang, sakit orang dari orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Ir. Fary Djemy Francis, MMA

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:
dari 1 orang Anggota

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
dari 1 orang Anggota

- 1.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
dari 1 orang Anggota

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
dari 1 orang Anggota

- 1.

- 1.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
dari 1 orang Anggota
1.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA:**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA:** dari 1 orang Anggota

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

FRAKSI PARTAI NASDEM:
dari 2 orang Anggota

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
1.

Jalannya rapat:

F- GERINDRA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA) :

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat saudara pimpinan, ini pak wakil ketua sudah hadir, Pak Sigit dan teman-teman-teman Anggota Komisi V DPR RI, Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dan seluruh jajarannya, Serta hadirin yang kami muliakan.

Diawal pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga kita melaksanakan tugas kita pada hari ini dalam keadaan sehat waa'lfiat. Berdasarkan informasi dari sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI yang telah menandatangani ini ada 15 anggota terdiri dari 5 fraksi kita masih nunggu 1 fraksi tapi nanti sambil berjalan pak menteri dalam pengambilan keputusan nanti kita akan menunggu 1 fraksi lagi, begitu pak ya? Pak Yosep? Pak Anton? ini masih 5 fraksi kita sambil jalan kita dengarkan paparan dan pada saat pengambilan kesimpulan kita harapkan sudah bertambah 1 fraksi lagi. oleh karena itu sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 251 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka rapat pada hari ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) rapat Komisi V DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.30 WIB)

Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saudara Menteri Perhubungan, saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini.

Para Menteri dan Pimpinan serta Anggota Komisi V yang kami hormati.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 2018 yang lalu, BPK RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 58 ayat (3) huruf b serta peraturan tata tertib DPR RI, Pasal 58 ayat (3) huruf b dinyatakan bahwa “tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi diantaranya membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya”. Oleh karena itu dalam kesempatan Raker hari ini, kami berharap bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif sampai sejauh mana temuan-temuan hasil BPK semester I tahun 2018 tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait serta langkah-langkah preventif apa yang dilaksanakan agar temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPR RI semester I tahun 2018 yang diterima Komisi V DPR RI beberapa hal yang perlu dijelaskan dan didalami lebih lanjut diantaranya :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BPK RI telah menetapkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian ada temuan yang terkait dengan sistem pengendalian intern diantaranya yang cukup penting ditindaklanjuti dan merupakan pokok-pokok kelemahan sebagai berikut :
 - a. Sistem pengendalian pendapatan negara dan hibah, dimana pengelolaan dana bergulir dan pendapatan tarif program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada badan layanan umum pusat pengolahan dana pembiayaan perumahan belum memadai.
 - b. Sistem pengendalian belanja negara, sistem pengendalian pelaksanaan belanja pada satker balai wilayah sungai, wilayah IV Sumatra belum memadai.
 - c. Sistem pengendalian asset lancar dimana pengelolaan kas dana operasional pada BLU PPDPP belum memadai bahkan terdapat perbedaan tafsiran atas perjanjian layanan dana bergulir pada Dirjen Bina Marga dan sistem pencatatan piutang atas tagihan penjualan angsuran Dirjen Cipta Karya belum memadai.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan yang merupakan pokok-pokok kelemahan dan cukup penting ditindaklanjuti diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan beberapa paket pekerjaan konstruksi tidak mengikuti ketentuan sehingga dapat kelebihan pembayaran senilai 50 miliar.
2. Pembayaran kemajuan fisik tahun 2011 atas pekerjaan tahun jamak yang melebihi kuantitas dan tidak sesuai spesifikasi senilai 42 miliar dan terdapat potensi kelebihan pembiayaan senilai 13 miliar.
3. Pembayaran pekerjaan yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya senilai 30.4 miliar.

4. Perencanaan pembangunan bendungan Logung kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan secara memadai senilai 65 miliar.

Kementerian Perhubungan BPK RI telah menetapkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang cukup penting ditindak lanjuti dan merupakan pokok-pokok kelemahan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian pendapatan,
 - a. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan pengolahan kas BLU pada akademi Teknik keselamatan penerbangan ATKP Medan belum memadai.
 - b. Pengolahan BNPB pada badan pengolahan transportasi Jadebotabek tahun anggaran 2017 belum memadai.
 - c. Pengolahan PNPB atas jasa pengawasan kegiatan bongkar muat barang pada satker kantong KSOP kelas 1 Tanjung Emas belum memadai.
 - d. Sistem pengendalian belanja pembayaran honor instruktur penerbangan mekanik pesawat pada Sekolah Penerbangan Indonesia Curug belum diukur standar biaya.
 - e. Belanja barang dalam rangka perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tidak sesuai dengan ketentuan.
 - f. Sistem pengendalian kewajiban

Direktorat Jendral Perhubungan Udara belum mendapat nomor registrasi dan pengesahan atas hibah barang dan jasa yang disajikan dalam kewajiban jangka pendek sebesar 1,751 triliun. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan ketidakpatuhan tersebut antara lain:

1. Pengolahan BNPB pada Kantor Pusat Sekjen Kementerian Perhubungan belum sesuai ketentuan.
2. Kekurangan BNPB atas terminal khusus migas 10 Poleng Marine terminal pada kantor BNPB kelas 3, Telaga biru provinsi Jawa Timur.
3. Biaya perawatan prasarana perkeretaapian yang diluar kontrak HMO sebesar 242, 99 miliar tidak diperhitungkan sebagai komponen PNPB.

Kementerian Desa dan PDT BPK RI telah menetapkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasionalnya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Kementerian Desa PDT adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran pembantu dan pemegang uang muka tidak tertib.
2. Pengendalian dan penatausahaan persediaan belum tertib.
3. Pencatatan dan penatausahaan asset tetap dan asset lain-lainya belum tertib.

Sementara laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang perlu ditindak lanjuti antara lain:

1. Perhitungan belanja tunjangan kinerja sebelum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai sebesar 2.3 miliar dan tercatat pembayaran ganda kepada 11 pegawai sebesar Rp 124.000.436.489,-
2. Realisasi belanja lembur pada Sekretariat Jendral Dirjen PKP 2 T- Trans berindikasi tidak real sebesar 4. 4 miliar.
3. Realisasi belanja jasa konsultasi dan belanja jasa lainnya berindikasi tidak real sebesar 4.1 miliar.
4. Kekurangan volume pekerjaan atas 57 paket pekerjaan sebesar 7.4 miliar, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp 760.000.782.919,-.
5. Jaminan pelaksanaan belum dipungut sebesar Rp 640.000.098.600,-.
6. Bukti pertanggungjawaban non fisik berindikasi tidak real sebesar Rp 872.000.981.991,- pada 5 OKE 1 dan OKE D di 5 provinsi.

Para menteri, dan para Anggota Komisi V dan pimpinan yang kami hormati.

Selain membahas tindak lanjut hasil BPK RI semester I tahun 2018, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus pada tanggal 11 Desember 2018 mengenai kebijakan umum dan jadwal acara rapat masa persidangan III tahun sidang 2018-2019 setiap komisi ditugaskan untuk mengagendakan rapat kerja dengan masing-masing kementerian mitra kerjanya dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018.

Untuk itu maka agenda kedua rapat kerja kita hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PD Transmigrasi, Komisi V DPR RI ingin mengetahui sekaligus mendalami sejauh mana pencapaian pelaksanaan program-program pada masing-masing kementerian pada tahun anggaran 2018 untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan nanti dapat disampaikan pula mengenai progres rekonstruksi paska bencana di Palu, di Dongala dan di NTT.

Demikian pengantar dari kami untuk penyingkat waktu, kami persilakan kepada Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa PD dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan sebagaimana permintaan kami. Kalau kita mengikuti penjelasan tadi maka khusus berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2018. Jadi Kementerian PU, Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian PD dan Transmigrasi itu diberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Begitu sebagai mitra kita tentu memberikan apresiasi untuk ketiga mitra kerja kita ini, walaupun ada catatan-catatannya. Silakan nanti teman-teman Anggota Komisi V bisa mendalami dan yang kedua kita juga akan masuk didalam rapat dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018. Ini teman-teman juga bisa memberikan input masukan berkaitan dengan materi yang kedua menyangkut evaluasi APBN tahun anggaran 2018. Kita sebentar jam 14.00 WIB itu ada rapat dengar pendapat umum dengan Dirjen Perhubungan Udara berkaitan dengan pembahasan ...dan juga isu-isu terkini di penerbangan kita menyangkut ticketing, dan juga berkaitan dengan menyangkut kebijakan bagasi maskapai penerbangan kita. Yang kita tahu semua dan untuk itu maka kita harapkan mudah-mudahan untuk agenda pertama ini bisa kita selesaikan paling lambat jam 13.00 WIB. Kita setuju ya untuk agenda kita untuk yang pertama ini?

(RAPAT : SETUJU)

Baik kita berikan kepada Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian Pak Menteri Perhubungan dan Menteri Desa PD dan Transmigrasi. Kami persilakan pak.

MENTERI PUPR (Ir. MOCHAMAD BASOEKI HADIMOELJONO, M.Sc., Ph.D.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat.

Sesuai agenda, kami laporkan 3 hal tadi laporan pemeriksaan LHP BPK RI semester I tahun 2018, pencapaian 2018 dan penanganan bencana di Sulteng, NTB mungkin di Selat Sunda dan sedikit yang dilakukan di banjir di Sulawesi Selatan.

Ibu/bapak sekalian.

Untuk laporan BPK RI ada 4 disini adalah

1. LHP laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2017.
2. Laporan keuangan loan Kementerian PUPR 2017.
3. LHP atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa 2014-2016 di Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Bina Marga masing-masing di Kaltim, Kaltara, Sulsel, Jabar, dan Jatim.
4. LHP atas audit kinerja pengelolaan pemanfaatan bendungan untuk irigasi tahun 2016 dan 2017 semester I.

Untuk LHP yang pertama, jadi pada umumnya untuk yang laporan pemeriksaan BPK RI ini ada 2 hal, 2 cluster yaitu sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan didalam pembelanjaan uang negara. LHP laporan keuangan untuk Kementerian PUPR 2017 yang tadi disampaikan oleh bapak pimpinan telah mendapatkan WTP, namun dengan beberapa catatan. *Summary* dari masing-masing temuan dan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tadi juga sudah di summary kan dengan jelas dan bagus sekali oleh bapak pimpinan. Untuk itu kami menyampaikan secara ringkas bahwa untuk LHP Kementerian PUPR, LHP laporan Keuangan Kementerian PUPR yang menjadi dasar untuk pemberian opini sistem pengendalian internal ada 24 rekomendasi. Jadi ada 16 temuan, 24 rekomendasi dan itu sudah ditindak lanjuti. Nah yang 24 rekomendasi itu sudah ditindak lanjuti, 3 yang sudah sesuai dan 1 baru dalam proses. Kemudian untuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dari 54 rekomendasi, 7 sudah sesuai dan 47 dalam proses. Maksudnya dalam proses ini adalah biasanya ada persepsi yang berbeda antara auditor dengan para satker pelaksana kegiatan. Jadi itu yang paling utama, perbedaan persepsi sehingga harus dilakukan diskusi bahkan memanggil pakar.

Kemudian yang kedua adalah LHP untuk laporan keuangan yang berhubungan dengan loan. Ada 7 loan yang diperiksa disini yaitu

1. ADB (*accelerating infrastructure delivery through better engineering service project*) jadi ini untuk pemilihan konsultan.
2. *Fleet management inselektive probation*, ini adalah konstruksi dari ADB juga.
3. *Jakarta urgent flood mitigation project*, jadi ini dari Bank Dunia.
4. *General road development project*, ADB.

5. WINRIP yaitu *western Indonesia national roads improvement project*, dari Bank Dunia.
6. *Neighborhood upgrading* ini yang NUSP,
7. ADB dan metropolitan sanitation management ini dari LADP juga.

Dari 7 loan yang diperiksa terdapat 17 temuan masing-masing loan ada disana dengan total semuanya 17 dengan 36 rekomendasi untuk sistem pengendalian internal. Dari 36 rekomendasi semua sudah ditindak lanjuti dan sudah sesuai dengan temuan BPK tadi. Kemudian untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada 36 rekomendasi juga yang sudah ditindak lanjuti dan sesuai dengan rekomendasi ada 28, sedangkan yang masih dalam proses 8 rekomendasi.

Kemudian untuk yang ketiga yaitu LHP atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2014-2016 di Dirjen Bina Marga dan Dirjen Sumber Daya Air di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Banten. Jadi ini hasil pemeriksaannya, ada temuannya 20 dengan rekomendasi 50. Yang sudah ditindak lanjuti dan sesuai dengan rekomendasi 42 sedangkan yang dalam proses adalah 8, itemnya saya kira sama dengan apa yang disampaikan *summary*-nya oleh Pak Ketua Komisi V tadi dalam pembukaan rapat ini.

Kemudian untuk yang LHP di kinerja pengelolaan dan manfaat bendungan tadi juga disebut ada Bendungan Logung di Kudus, pemeriksaan ini menghasilkan ada temuan 17 dengan 23 rekomendasi dan Alhamdulillah semuanya sudah ditindak lanjuti dan sudah sesuai dengan rekomendasi tersebut yaitu 23. Itu tadi pak sekalian tentang hasil audit BPK semester I 2018 terhadap kegiatan-kegiatan di anggaran tahun 2017. Kemudian kami laporkan juga evaluasi pelaksanaan pekerjaan tahun 2018. Ini hanya sekedar merefresh saja, 2015-2019 program RPJNN Kementerian PUPR adalah seperti yang ada disini dan dapat diperiksa dibuku kami adalah 65 bendungan 1 juta hektar pembangunan jaringan **invansi** baru kemudian pembangunan embung 1.882 buah, pembangunan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air, maksudnya banjir 3620 km. Kemudian untuk konektivitas 1.852 km jalan tol, 2.650 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan baru 9.000 m, pemukiman akses air minum layak kemudian penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan, kotaku dan sanitasi persampahan serta perumahan.

Secara sekilas kami kemarin kami baru terima dari Bappenas, evaluasi kemungkinan pencapaian yang seingat saya untuk Kementerian PUPR ada 20 kegiatan yang program, 9 akan tercapai seperti konektivitas kemudian irigasi, dan itu akan tercapai, yang 8 harus kerja keras, sedangkan yang 3 yang mungkin tidak akan tercapai. Yang 3 itu adalah akses air minum karena sekarang baru sekitar 72 % dan sanitasi persampahan itu baru 62 % serta perumahan untuk menghilangkan *badlock*. Jadi 3 kegiatan utama itu yang mungkin tidak akan tercapai di 2019 maksudnya. Jadi nanti sampai dengan 2019, *insya allah* selain 3 hal itu akan bisa tercapai seperti halnya misalnya pembangunan bendungan sekarang sudah ada 40, tinggal tahun ini mungkin mulai.... Pembangunan jaringan irigasi baru 1 juta hektar juga akan tercapai di 2019, sekarang sudah sekitar 890-an ribu hektar. Saya yang irigasi yang 3 juta hektar juga mudah-mudahan bisa tercapai. Konektivitas pembangunan jalan tol *insya allah* sudah tercapai. Tahun ini sampai dengan 2018 ini ada 800-an 70 km mungkin *insya allah* nanti dengan Bakauheni-Terbanggi Besar, Kayu Agung-Palembang yang tahun depan bisa diresmikan 350 km disitu dan termasuk yang ke Banyuwangi kemudian di Manado-Bitung dan Samarinda-Balikpapan, mudah-

mudahan bisa tercapai. Pembangunan jalan baru, ini juga pasti akan tercapai dengan pembangunan trans di Kalimantan maupun di Papua.

Untuk 2018 sendiri, ini adalah pembangunan bendungannya. Jadi pembangunan bendungan kita ada 65. Yang baru 49 yang terusan dari sebelumnya 16. Pada tahun 2018 ini ada 55 pembangunan bendungan. Selanjutnya ini bisa tadi yang pembangunan jaringan mitigasi baru sampai dengan 2018 ada 865 ribu sehingga kalau targetnya 2018 1 juta, tahun ini sekitar 135-an ribu akan bisa kita capai sesuai dengan program yang sudah disetujui oleh Komisi V DPR RI ini. Kemudian tadi yang pembangunan jalan tol tahun ini dari 2018 sudah 782, jadi kebalik angka saya 870 ternyata 782, sehingga mungkin 2019 akan bisa tercapai 1.852 tadi. Kalau pembangunan embung yang sekarang ini sudah 942 buah, targetnya 188 dengan program 2019 embung akan tercapai, itu secara fisik. Sedangkan yang untuk anggaran ibu bapak sekalian pada 2018 ada 115 triliun, pencapaiannya pada tahun 2018 ini fisiknya 91 %, keuangannya 90 %. Jadi saya kira kalau kita runut dari 2015 92 % keuangan, 2016 84.7, 2017 90.8 dan 2018 9.6, jadi saya kira rata-rata 90 %. Ini kalau dilihat per Direktorat Jendral Bina Marga 89.3, SDA 86.8, Cipta Karya 92.5, dan Perumahan 95.5 serta Sekjen, Dirjen dan Badan-badan 93.4%.

Ibu bapak sekalian.

Demikian tadi yang pencapaian 2018, ini masing-masing sektor ada disini. Jadi untuk Sumber Daya Air, untuk Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2018 bisa mencapai lebih dari 1 juta lebih hunian yang bisa di bangun oleh Kementerian PUPR. Kemudian untuk penanganan bencana,

Bapak ketua/wakil ketua, ibu-ibu bapak-bapak Anggota Komisi V DPR RI Terhormat,

Untuk yang di Nusa Tenggara Barat, ada 2 hal yang ditugaskan di Kementerian PUPR yaitu memperbaiki fasum, jadi direkomendasi untuk dibangun 1.437, jadi prasarana pendidikan, kesehatan, pasar, tempat ibadah dan lain-lainnya. Kemudian yang dibangun oleh Kementerian PUPR ada 706, yang sudah selesai 337 dan ini sudah mendekati akan selesai 369, totalnya 706. Kemudian dibangun oleh pihak lain secara swadaya maupun oleh para donatur ada 731 unit. Ini progressnya saya kira cukup baik kalau untuk yang fasilitas publik, ini untuk masing-masing tadi. Kemudian untuk pembangunan rumah ibu bapak sekalian, PU ditugasi untuk mendampingi membangun rumahnya sehingga menjadi ramah gempa bahkan tahan gempa. Ada 5 tipe rumah yang di pilih oleh masyarakat yaitu Rumah Instan Sederhana Sehat yang dari Litbang PU, Rumah Instan Kayu, Rumah Instan Konvensional, Rumah Cetak Indonesia dan Rumah Instan Sederhana Baja. Ini semua bisa dipilih oleh masyarakat melalui Pokmas-nya untuk bisa dibangun. Hanya melihat konstruksinya saja sambungan-sambungannya, sengkang-sengkangnya, sehingga tidak ada, bisa sesuai dengan kaidah teknis untuk tahan gempa tadi.

Ibu bapak sekalian.

Sesuai dengan verifikasi jadi SK bupati untuk rusak berat yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk membangun kembali, ada 74.092 rumah.

Masyarakat memilih RISA 4.300, memilih kayu 8.600, memilih rumah konvensional biasa 7.800, untuk rumah cetak Indonesia 56, kan memang ini baru, dan rumah Instan Sederhana Baja 386. Ini yang sudah dipilih oleh masyarakat sesuai dengan uang yang diterima dari PNPB.

Sekarang progressnya dari 21.360, telah dibangun 5.160. Ini memang lambat sekali banyak sekali faktornya:

1. Tenaga kerja, walaupun kita sudah mentraining tenaga kerja lokal kemudian bahan-bahan juga menjadi kebutuhan banyak. Untuk itu percepatannya dengan Bapak Kepala PNPB yang baru ini akan ditambah fasilitator dari TNI yang sekaligus menjadi tukang sekitar 1.000-1.500 orang. Besok beliau kesana untuk memastikan ini, bisa menambah tukang. Karena kami sudah berpresentasi didepan Timwas DPR RI yang minggu lalu bersama bapak-bapak menteri lainnya. Jadi karena memang kita sudah mentraining 330 lebih tukang di lokal tapi ternyata 2 minggu bekerja sudah resign.
2. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih ini yang td kami disampaikan.
3. Pembangunan... dapat dikontrakkan ini usulan pak gubernur kepada Timwas. Jadi dengan melihat lambatnya ini kalau mereka membangun sendiri, ini ada usulan jadi maksud dari PNPB ke BPBD yang 50 juta untuk rusak berat. Dari BPBD langsung ke rekening masyarakat. Dari rekening masyarakat dikumpulkan oleh Pokmas untuk bisa membangun. Dari Pokmas ke pembangun ini biasanya kita kelola, tapi karena melihat lambat begini, nanti Pokmas bisa mengontrakkan. Tapi tetap harus didampingi oleh Timwas diminta untuk tetap didampingi oleh PU. Jadi, mudah-mudahan dengan sistem itu akan menjadi lebih cepat.

Kemudian untuk yang di Sulawesi Tengah karena ini approach-nya beda dengan adanya likuifaksi dan daerah yang rawan bencana maka dilakukan relokasi bisa dilakukan kalau sudah didapatkan lokasi yang aman dan tanah statusnya yang clean dan clear. Tim 5 dibawah kordinasi Bappenas, ATR, BMKG, Badan Geologi dan PUPR sudah menyelesaikan...yang aman dan yang rawan namun masih didalam peta 1: 20.000.

Minggu ini diminta oleh Pak Wapres untuk bisa dipasang patok dilapangan mana-mana yang daerah rawan sehingga yang memang betul-betul dilarang untuk pembangunan barunya. Sambil menunggu itu dibangunlah huntara-huntara dari pemerintah membangun sekarang ini ada 699 huntara yang sedang dibangun, 256 unit sudah selesai, sekarang sudah mulai dihunikan. Yang sudah penuh 26 unit penghunian oleh Pemda kemudian akan terus di pindahkan ke hunian karena ini kira-kira butuh 2 tahun ini sekarang tanahnya saja belum clean dan clear, sedang kita ingin memakai HGU yang sudah habis, kemudian ditugaskan ATR untuk bisa menyelesaikan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil rapat dengan wapres pada tanggal 24 Januari percepatannya adalah dana stimula masyarakat terdampak, ini disana ada juga. Yang rusak berat tapi tidak perlu direlokasi karena dia berada didaerah yang kuning tadi. Kalau berada yang dimerah seperti Balaroa, Petobo itu harus pindah. Yang rusak berat tapi tidak perlu pindah tetap diberikan yang 50 juta tadi. Kemudian peta zona rawan bencana akan tetap diterapkan dilapangan dengan floating data tadi, karena peta yang dihasilkan peta dengan skala kecil.

Penyelesaian status perdata ini yang tadi sudah saya sampaikan harus clear dan clean. Dan penerapan skema stimulan untuk perbaikan rumah rusak dan

pembangunan huntara dimungkinkan melalui skema kerja sama dengan penyedia jasa. Kemudian sedikit untuk yang Lampung dan Banten, rencana pembangunan hunian tetap di Banten, Kabupaten Banten dan Lampung. Di Lampung Selatan yang rusak ringan 114, rusak sedang 87 dan rusak berat 558. Sedangkan Kabupaten Pandeglang rusak ringan 456, rusak sedang 49, dan rusak berat 1.022. Ini yang menjadi prioritas kedepan, ini juga harus ada relokasinya. Di Lampung juga sedang dicari lokasi tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Ada tanah tapi sekitar 20 km dari lokasi bencana di Waimuli, sehingga masyarakat masih belum menerima dengan baik.

Kemudian penanganan bencana banjir di Sulawesi Selatan, kemarin hari minggu kita datang kesana. Saya kira ada beberapa hal.

1. Jadi terjadi banjir ini karena memang cuacanya, jadi. Di daerah Makasar itu curah hujan pertahun sekitar 2.200. Kemarin 1 hari 328 milimeter. Elevasi tertinggi bendungan bili-bili 103 meter. Kemarin muka air di Bili-bili masih 101, jadi masih *save* hanya karena SOP yang dibuka bukan pintu bendungannya tapi *spillway*-nya. Jadi pelimpahannya itu memang dibuka tapi tidak full buka hanya sesuai SOP saja. Untuk itu ada beberapa hal yang sedang ingin dilakukan, ada 1 jembatan yang runtuh di Jenerata ini sedang dibuat, sekarang ini mungkin sedang dimulai *value*-nya, jembatan daruratnya. Di beberapa kabupaten ada jembatan kabupaten dan jembatan desa yang runtuh, ini sedang dievaluasi oleh balai besar jalan di Makasar untuk bisa diusulkan untuk diperbaiki. Jangka panjangnya Bapak Wapres memerintahkan kepada Gubernur dan PNPB untuk melakukan penertiban, penataan di kawasan hulu karena sekarang juga sedang demam menanam jagung itu sangat erosif sekali seperti halnya di Gorontalo, sehingga ketika beliau melihatnya airnya coklat itu berarti... sudah rusak.
2. Rencana pembangunan Bendungan Jenerata, ini di hilir Bendungan Bili-bili. Ini juga berkontribusi terhadap banjir, jadi kalau air ditahan di Bili-bili, di hilirnya masih ada Sungai Jenerata yang 1.200 meter kubik perdetik, sehingga sangat yang mempengaruhi banjir kemarin, padahal sudah ditahan di. Inflow ke Bili-bili 3.200 meter kubik perdetik, *inflow*-nya. Dikeluarkan hanya sekitar 800-an. Karena dari generator sudah ada 1.200, sehingga kapasitas sengaja nyebrang di karena sesuai dengan kapasitas nyebrang di hilir.

Jadi saya kira dengan rencana penanganan ... dan pembangunan Jenerata untuk bisa mengurangi banjir di masa depan. Saya kira sementara itu bapak pimpinan yang bisa kami laporkan yaitu hasil audit BPK untuk semester I 2018, kemudian pencapaian PUPR 2018 dan penanganan bencana alam. Sekali lagi kami juga laporkan bahwa ini sudah kami sampaikan ditim pengawas penanganan bencana di DPR RI yang diketahui oleh Bapak-bapak Wakil Ketua DPR. Kurang lebihnya saya mohon maaf

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Silakan Pak Menteri Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih pak ketua.

**Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua,
dan Anggota Komisi V yang saya hormati.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini kita sampaikan untuk kebaikan berkat dari Allah SWT, oleh karena-Nya kami ucapkan terima kasih kepada Komisi V DPR RI yang telah memberikan kesempatan untuk membahas 3 hal :

1. Berkaitan dengan pemeriksaan BPK semester I 2018 tentang evaluasi APBN 2018.
2. Pencapaian keberhasilan tahun 2015-2018
3. Progress rekonsentrasi pasca bencana di NTB, Palu dan Dongala.

Pak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang kami hormati.

Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan :

1. Berkaitan dengan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I tahun 2018 BPK dilingkungan Kementerian Perhubungan dimana terdapat 50 laporan hasil pemeriksaan dengan 971 rekomendasi senilai 2.1 triliun, dimana posisi saat ini 74% sudah tuntas, 22 % belum sesuai, 2.4% belum ditindak lanjuti, dan ada 4 rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti. Disamping itu kami juga melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian ganti rugi negara atas hasil pemeriksaan sampai semester I 2018 dilingkungan Kementerian Perhubungan dimana terdapat 74 kasus dengan kerugian sebanyak 590 miliar. Posisi saat ini telah dilakukan tindak lanjut dimana sudah diselesaikan sebanyak 56 kasus atau 433 miliar. Belum selesai 17 kasus atau 39 miliar, dihapuskan setelah ingkrah sesuai dengan MA 1 kasus sebanyak 21 miliar.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

2. Selanjutnya hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah evaluasi APBN tahun 2018, dimana tahun 2018 Kementerian Perhubungan mendapat pagu sebanyak 48.2 Triliun. Perkembangan mengalami perubahan berupa peluncuran PHLN SDLN sebanyak 4.6 triliun serta saldo BLU BNPB sebanyak 200 miliar, selain itu Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi pagu insentif sebanyak 309 miliar. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebanyak 53 triliun. Dari alokasi pagu tahun anggaran 2018 sebanyak 53 triliun, dialokasikan belanja pegawai sebanyak 4 triliun, belanja barang sebanyak 16 triliun dan belanja modal sebanyak 32 triliun. Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan 2018 sebanyak 45 triliun sedangkan realisasi anggaran 2017 adalah 41 triliun.

Selanjutnya Kementerian Perhubungan tahun 2018 menargetkan PNPB sebanyak 9 triliun dengan realisasi 8.2 triliun jika dibandingkan dengan PNPB 2017 sebanyak 7.3 triliun yang hanya 68 %. Maka terdapat kenaikan sebanyak 12 %. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 masih dijumpai adanya kendala dan hambatan yang dialami antara lain lahan proses dokumen kontrak tahun jamak, belum efektifnya pelaksanaan kegiatan dana pinjaman dan hibah luar negeri dan masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat menjadi anggota kelompok kerja pengadaan. Oleh karenanya beberapa upaya telah dan sedang dilakukan antara lain:

- a. Pembekalan kepada KPA maupun BPK.
- b. Sertifikasi kepada bendahara dan percepatan proses pelelangan barang dan jasa.
- c. Pencarian dana kontrak tahun jamak bersumber dari SBSN.
- d. Pembentukan kelompok kerja.
- e. Pemilihan penyedia barang.

Bapak ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang saya hormati.

3. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mencapai keberhasilan Kementerian Perhubungan:

1. Berkaitan dengan pembangunan ganda reaktifasi sebanyak 735 km panjang, peningkatan tihabilitasi sebanyak 394 km, pembangunan WRT sebanyak 1900, bus sekolah 180, angkutan umum 100 unit, dan ...sebanyak 65 lokasi.
2. Pembangunan kapal penyebrangan sebanyak 14 unit.
3. Pembangunan pelabuhan laut melalui komersial sebanyak 104 lokasi.
4. Pembangunan bandara baru sebanyak 10 bandara.
5. Pembangunan pelabuhan sebanyak 21 lokasi.
6. Pembangunan kapal pendukung tol laut 100 unit dan kapal Danau Toba sebanyak 2 unit.
7. Diklat Pemberdayaan masyarakat sebanyak 151.000 peserta dan pengadaan 51 pesawat....

Guna mendorong pemerataan serta pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan untuk ...logistik dimana 2018 penyelenggaraan tol sebanyak 18 trayek, kapal perintis sebanyak 113 trayek, ...kapal pendukung tol 11 unit disamping itu pelaksanaan jembatan udara mengalami peningkatan frekuensi menjadi 41 penerbangan di 5 bandara HAP.

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pencapaian pembangunan infrastruktur beberapa proyek strategis nasional telah selesai guna mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Pengembangan pelabuhan Hub Kuala Tanjung.
2. Pengembangan Makasar New Port.
3. Pembangunan LRT Sumatra Selatan.
4. Pembangunan kereta ekspres, kereta bandara.
5. Pembangunan Jalur Kereta api, Rabomunik kereta api.
6. Bandar udara Kertajati Majalengka.
7. Bandar udara Sultan Babullah Ternate.
8. Bandar udara Ahmad Yani.

Selain itu Kementerian Perhubungan juga berupaya meningkatkan keselamatan sektor transportasi dengan pencapaian :

1. Pemasangan jalan berupa APIL dengan rincinan beberapa kegiatan baik warun light, marka jalan, paku jalan dan juga rambu.
2. Moritisasi navigasi optimalisasi, alokasi... radio... perbaikan pelayanan meteorologi penerbangan dan instalasi ADSB di 7 lokasi.
3. Rasio kecelakaan transportasi kereta api mengalami penurunan 2017 1.15 menjadi 0.25 di 2019.
4. Harmonisasi peraturan keselamatan pelayaran, peningkatan pengawasan kinerja aparaturnya keselamatan pelayaran, diklat teknis keselamatan pelayaran dan bimbingan teknis keselamatan pelayaran. Juga...IQ *universal testi overside audit program...*
5. Melakukan sertifikasi register bandar udara.
6. Menyusun dan merevisi peraturan keselamatan Bandar udara.
7. Sebagai upaya pengembangan SDM, sektor transportasi telah dilakukan diklat pemberdayaan masyarakat di tingkat DPM sebanyak 151.000 peserta.
8. Pengadaan 51 pesawat latih
9. Pengadaan 6 kapal lightih.
10. Pembangunan pengembangan 10 kampus diseluruh wilayah Indonesia.

Disamping itu juga dilakukan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penanganan kemacetan di tol jabodetabek dengan menerapkan ganjil genap sehingga menjadikan kenaikan kecepatan rata-rata dan kenaikan penggunaan angkutan umum ditol dimaksud. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan telah dilakukan transportasi online guna pemanfaatan teknologi generalisasi disektor transportasi untuk mempercepat pelayanan dan mempermudah pelayanan. Adapun bentuk transportasi yang telah dilakukan yaitu : inaportret....e-ticketing.

Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati.

Selanjutnya hal keempat yang ingin kami sampaikan adalah mengenai progress rekontruksi bencana NTB pada Gili Trawangan. Untuk progress saat ini finalisasi desain fasilitas pelabuhan dan dilanjutkan proses lelang dengan rencana diselesaikan 2019. Untuk Pelabuhan Pemenang, saat ini progress pada tahap finalisasi desain fasilitas pelabuhan lelang dan perbaikan dermaga apung serta fasilitas darat dan akan dilaksanakan di 2019. Untuk diketahui untuk bandara tidak terdapat kerusakan yang tidak signifikan sehingga sudah diselesaikan pada 2019.

Untuk rekontruksi pasca bencana Palu, Donggala pada Pelabuhan Pantoloan, Donggala dan Wani saat ini progress ketiga pelabuhan masih dalam proses pengadaan pendanaan yang akan diberikan oleh ... dimana estimasi biaya perbaikan Pelabuhan Pantoloan sebanyak 790 milliar, Donggala 130 milliar, Wani 105 milliar. Rencana rekontruksi ketiga pelabuhan tersebut akan dilaksanakan 2019-2021. Disamping itu, progress rekontruksi Bandara Udara Mutiara SIS Al-jufri untuk gedung terminal, *runway* dan gedung PPK saat ini dalam tahap pembuatan *shelter* sementara selesai, sedangkan ATC dalam proses lelang air navigakasi. Selanjutnya Pelabuhan Taipa masih dalam proses lelang yang akan kita selesaikan 2019.

Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua dan Bapak/ibu Anggota Komisi V yang saya hormati.

Demikian yang dapat saya sampaikan upaya pelaporan tentang pemeriksaan BPK, evaluasi APBN, pencapaian keberhasilan dan rekonstruksi bencana NTB dan Sulawesi. Semoga pelaksanaan 2019 dapat diberikan kelancaran dan terima kasih atas dukungan Komisi V. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri Perhubungan.
Terakhir Pak Menteri Desa PD dan Transmigrasi.

MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (EKO PUTRO SANDJOJO):

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

*Shalom,
Om swastyastu,
Namo Buddhaya.*

Yang kami hormati pak ketua, pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang terhormat.

Berikut izinkan kami melaporkan pencapaian dulu, nanti setelah itu kami melaporkan hasil *review* temuan BPK. Pada akhir tahun lalu, BPS telah mengeluarkan hasil dari sensus potensi desa. Dalam sensus potensi desa tersebut, *alhamdulillah* kita telah berhasil melampaui beberapa target, diantaranya RPJM untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan menciptakan 2.000 desa mandiri. Awal tahun lalu kita telah berhasil menciptakan 6.518 desa menjadi tidak tertinggal lagi menjadi desa berkembang dan 2.665 desa mandiri. Jadi target sampai 2019 akhir sudah tercapai di awal tahun lalu. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih semuanya karena berkat dukungan dari teman-teman dari Komisi V DPR RI yang saya lihat sebagian besar teman-teman ikut aktif dalam sosialisasi bursa inovasi desa, sosialisasi dana desa dan lain-lain sebagainya.

Kemudian dari target-target RPJN yang lain, yaitu menguatkan 39 pusat pertumbuhan, halaman berikutnya pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan desan dan kota yang menurut RPJM membuat 30 kawasan. Kita sudah berhasil mencapai 38 kawasan. Mudah-mudahan tahun ini dapat menyelesaikan sisanya tersebut.

Untuk pembangunan daerah tertinggal, terentaskan 80 daerah tertinggal target RPJM-nya. Sampai akhir tahun lalu kita telah berhasil mengentaskan 59 masih kurang 21. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini kita bisa menyelesaikannya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal menjadi 6.9-7.1, sampai akhir tahun lalu pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal 6.47 %. Ini tentunya tidak lepas dari harga komoditas dunia yang jelek karena mayoritas dari desa-desa tertinggal kita sangat tergantung dengan harga-harga komoditas tapi juga dengan dibangunnya desa-desa pariwisata dan plukades itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah tertinggal. Kemudian menurunnya penduduk miskin

didaerah tertinggal, targetnya adalah mencapai 15-15.5, kita baru mencapai 18% penduduk miskin didaerah tertinggal.

Kemudian meningkatnya indeks pembangunan manusia didaerah tertinggal menjadi 62.7, kita sudah mencapai 61.24, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencapai sesuai target RPJM. Mengenai pembangunan ketransmigrasian, yaitu terbangunnya dan berkembangnya kawasan yang berfokus kepada 72 satuan pemukiman menjadi pusat satuan di 144 kawasan pengembangan yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, perikanan dan mendukung sasaran kemandirian. Akhir tahun lalu, targetnya sudah tercapai dari 144 kita sudah mencapai 153 kawasan. Kemudian berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru menjadi kota kecil atau kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dari target 20 kita baru mencapai 18, *insya allah* tahun ini yang sisanya bisa kita selesaikan.

Kemudian mengenai hasil pemeriksaan BPK Nomor 80 tahun 2018 atas laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana diutarakan oleh pak ketua, bahwa tahun lalu dan sejak 2 tahun ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hasil opini auditnya telah meningkat dari WDP menjadi WTP.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.

Kementerian desa ini adalah kementerian yang baru yang merupakan gabungan dari pretelan 3 kementerian yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan transmigrasinya masuk kekita, kemudian desa dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Tentunya marging dari ketiga kementerian ini bukan hal yang mudah dan kita juga sampai akhir 2015 kita masih 16, masih banyak dihadapi sama persoalan-persoalan audit yang pending sejak tahun 1991. Jadi, itu pekerjaan rumah yang panjang untuk menyelesaikan pending meter tersebut tapi alhamdulillah ditahun 2016 kita berhasil menyelesaikan hal tersebut sehingga mulai dari tahun 2016 audit opini kita berhasil meningkat dari WDP menjadi WTP. Tapi tentunya juga masih belum sempurna sekali karena banyak pending meter yang harus diselesaikan, disamping kita juga melakukan reorganisasi internal. Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi komitmen kita terhadap integritas sangat kuat sekali. Jadi kita lakukan audit terhadap semua pejabat kita. Jadi pejabat kita yang PPATK-nya jelek itu pasti tidak akan bisa menjabat lagi. Jadi dalam 2 tahun ini kita mengadakan perubahan di 6 direktur jendral 12 eselon 2, 300 eselon 3. Jadi membuktikan bahwa agar kita ada komitmen terhadap tata kelola dan setiap weekend kita berikan pendidikan tambahan di bisnis *school* untuk belajar *leadership, management, accounting comment content, marketing*.

Alhamdulillah Bapak-bapak/ibu-ibu berdasarkan penilaian dari *ombudsman* tingkat kepatuhan dan pelayanan publik kita meningkat dari 50 nilainya menjadi 96 tahun ini. Kita naik dari ranking 78 menjadi ranking ke-4. Kita juga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar yang terbaik selama 2 tahun berturut-turut.

Kembali kepada tindak lanjut hasil temuan, didalam hal sistem pengendalian internal itu didapatkan masukan dari BPK :

1. Kelemahan di sistem pengendalian akuntansi pelaporan. Ini lebih banyak kepada ketidakmampuan staff kita terhadap *accounting system*, makannya kita bantu dengan diadakannya *weekend school* untuk belajar *accounting comment content*.

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi posting-posting itu lebih banyak dan yang kita lakukan adalah selain mengadakan pendidikan *accounting comment content* tadi, tindak lanjutnya adalah kita sudah mengeluarkan surat instruksi menteri kepada unit kerja satuan 1, eselon I dan dari eselon I juga sudah memberikan instruksi kepada para pengelola persediaan dan BMN
3. Kelemahan sistem pengendalian anggaran dan pendapatan belanja, tindak lanjutnya adalah kita sudah mengeluarkan disamping bimbingan ya, surat instruksi kepada OKE I dan pengendalian atas penatausahaan asset tetap dan asset lain-lain.
4. Kelemahan struktur pengendalian internal, kita sudah melakukan pembinaan dan instruksi kepada OKE I dan SOP, kita juga dibantu BPKP jadi sebelumnya SPP kita nilainya 1.6, mudah-mudahan tahun ini kita bisa targetnya SPP kita nilainya 3.4, tahun lalu assessment sementara masih sekitar 3.2.

Bapak-bapak/Ibu-ibu.

Adapun jenis temuannya adalah telah kita melakukan langkah-langkah tersebut :

1. Kekurangan volume pekerjaan atau barang. Nilai temuannya adalah 6.6 miliar. Sudah kita tindak lanjuti selama 6 bulan ini Rp 3.447 miliar, 52 % sudah kita tindak lanjuti.
2. Kelebihan pembayaran, mudah-mudahan dalam 2 tahun ini akan terselesaikan. Kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan atau barang itu ada 1 miliar sudah kita tindak lanjuti dan minta kesanggupan dari semua kontraktor untuk menyelesaikan hal tersebut, tanda tangan di atas materai semuanya.
3. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan itu ada 8 miliar sudah kita tindak lanjuti sebanyak 2.1 miliar.
4. Belanja perjalanan dinas 9.42 itu sudah kita tindak lanjuti 2.8, ini juga ada *misunderstanding* karena dalam perjalanan dinas itu ada perjalanan dinas yang paginya pegawai kita kekantor dulu sehingga absen, siangya baru pergi. Nah ini ada *dispute* dengan BPK, akhirnya mereka kita minta untuk mengembalikan, dianggap kalau pagi absen hari itu juga perjalanan dinas itu ada double-doubel, padahal mereka memang datang dan perginya disiang harinya. Apa boleh buat mereka kita minta untuk mengembalikan dan sudah dikembalikan dari 9.4 miliar, itu 2.8 miliar.
5. Belanja atau pengadaan barang atau jasa lainnya 4.1 miliar, sudah ditindak lanjuti 800 juta dan lain-lain 610 juta sudah ditindak lanjuti Rp 90 juta, jadi total temuan 30 miliar sudah ditindak lanjuti selama 6 bulan ini hampir 10 miliar atau 31 %.

Kemudian permasalahan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian atas LKKL dan LKBUN tahun 2017 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jenis temuannya adalah kelebihan pembayaran atau pengadaan barang dan jasa itu 81 juta sudah kita tindak lanjuti dan ada kesanggupan untuk kontraktornya mengembalikan.

Kemudian denda keterlambatan yang belum dipungut 760 juta, semua sudah kita minta komitmentnya untuk membayarkan kepada negara dan sudah ditindak

lanjuti 304 juta. Penerimaan selain denda yang belum dipungut Rp 6 juta sudah selesai. Kemudian permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara atas LKKL dan LKBUN tahun 2017 di Kementerian Desa :

1. Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan, perlengkapan atau BMN. Kita sudah tindak lanjuti dengan memberikan surat kepada seluruh OKE I dan komitmen agar mereka segera menyelesaikan dan itu dilanjutkan dengan instruksi dari Sekjen ke BP dan BPP dan surat permohonan persetujuan usulan sewa BMN ke DJKN Kementerian Keuangan serta sosialisasi tata cara pelaksanaan sewa BMN di Kementerian Desa dan para pengguna anggaran.
2. Bukti pertanggung jawaban yang tidak lengkap atau tidak valid, itu sudah kita tindak lanjuti dengan mengeluarkan surat menteri keseluruhan OKE I.
3. Perhitungan kembali secara berkala atas pembayaran Tunkin berdasarkan penilaian dan kinerja yang real.
4. Kepemilikan asset tidak atau belum didukung bukti yang sah. Sama sudah kita tindak lanjuti semua dan kita melakukan pembinaan dan tentang SOP-SOP kita libatkan dari BPKP dan BPK untuk mengadakan sosialisasi.
5. Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran yang belum disetor kepada negara. Sama sudah kita tindak lanjuti seperti yang lainnya juga.
6. Adapun nilainya program dukungan ini hasil penyerapan anggaran tahun lalu untuk di sekjen itu penyerapan anggarannya yang bisa terserap 92.10 %, untuk Inspektorat Jendral itu 93.67 % kemudian untuk Direktorat Jendral PPMD 92.33 % kemudian untuk Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan itu 97.59 %, untuk Direktorat Jendral Pengembangan Daerah Tertentu penyerapan anggarannya 94.93 % kemudian untuk program pembangunan daerah tertinggal itu penyerapannya 93.80 % sedangkan untuk program penyiapan kawasan dan pemukiman transmigrasi itu 95.26 %, program pengembangan kawasan transmigrasi 91,82 % dan untuk balilafu 93 %. Overall Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi penyerapan anggarannya tahun lalu 93 %, kemudian untuk supervisi penggunaan dana desa juga selama 4 tahun ini kalau bisa ditampilkan pencapaian dana desa, grafiknya kalau ada.

Dengan dukungan dari Bapak-bapak/Ibu-ibu dari Komisi V DPR RI, desa telah mampu membangun infrastruktur dalam skala yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia yaitu seperti membangun jalan lebih dari 191 ribu kilometer, jalan-jalan kecil di desa-desa, jembatan 1.000 km lebih, pasar desa, Bumdes, Posyandu, Polindes, itu puluhan ribu jumlahnya dan ini sangat mampu menurunkan angka kemiskinan didesa dan kemiskinan didesa juga sekarang spacenya tidak kalah penurunannya dengan kemiskinan dikota. Kita juga berhasil bekerja sama dengan beberapa kementerian, melakukan starting tapi 67 % penurunan starting itu kontribusinya dari proyek infrastruktur dari dana desa karena pembangunan hampir 1 juta unit air bersih, ratusan ribu MCK, puluhan ribu Polindes, posyandu dan lain sebagainya. Ini spacenya salah satu penurunan starting tertinggi di dunia menurut world bank walaupun 30% masih besar tapi kalau ini kita bisa pertahankan dalam waktu 6 tahun kemudian apa 10 tahun kemudian, Indonesia mungkin akan bebas dari starting.

Kemudian pendapatan perkapita didaerah juga naik cukup signifikan hampir 50 % dari 572.000 perorang perbulan menjadi Rp 804.000 perorang perbulan.

Generasio juga turun didesa dari 0.33 ditahun 2015 menjadi 0.319 ditahun 2018. Mungkin ada pertanyaan kenapa ditahun lalu ada sedikit kenaikan generasio? dalam Teori Kuznets bapak-bapak/ibu-ibu generasio itu diukur berdasarkan 20 % orang yang kaya dibandingkan dengan 40 % golongan menengah dan golongan miskin. Orang kaya didaerah itu sebetulnya masih untuk secara nasional belum masuk orang kaya, sehingga pada saat *income* mereka naik spending mereka juga naik, sehingga terjadi seolah-olah kenaikan generasio tapi itu otomatis akan turun dengan sendirinya.

ANGGOTA DPR :

Bapak menteri intrupsi lewat bapak ketua.

Kami tertarik dengan gambar-gambar itu, hanya tidak ada di laporan minta tolong di lengkapi.

MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI (EKO PUTRO SANDJOJO):

Oke kita lengkapi pak.

Jadi angka pengangguran terbuka didesa dengan adanya prukades dan dana desa itu juga turun cukup signifikan. Bahkan angka pengangguran didesa hampir setengahnya dari angka pengangguran terbuka dikota. Ini tentunya bisa tercapai karena dukungan dari Bapak-bapak/ Ibu-ibu Anggota Komisi V yang terhormat. Demikian yang dapat bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.

Selanjutnya kita beri kesempatan kepada teman-teman Anggota Komisi V untuk memberikan pendalaman. Kami dari meja pimpinan menawarkan :

1. Kita akan melanjutkan rapat pembahasan hasil rekomendasi BPK ini ditingkat para eselon pak yang ada catatan-catatannya akan kami panggil dengan para eselon yang ada catatannya itu pak. Nanti mungkin minggu depan sebelum kita masa reses kita panggil para eselon yang ada catatannya.
2. Kita akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi-lokasi yang ada catatannya pak.
3. Saya beri kesempatan kepada teman-teman Anggota Komisi V kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, saya berikan kesempatan. Tadi kita sepakati paling lambat kita bisa selesai jam 12.30 WIB. Jadi sekarang kalau teman-teman anggota mau memberikan beberapa catatan langsung kepada pak menteri. Silakan saja pak, nanti kita akan rapat dengan para eselon I khusus pak yang terkait yang ada catatannya pak. Oleh sebab itu saya beri kesempatan yang pertama kepada Pak.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si) :

Intrupsi Pak ketua.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si) :

Intrupsi sebentar saja.

Terkait dengan apa baru saja yang disampaikan oleh pak ketua dengan rencana rapat berikutnya untuk menindaklanjuti laporan pemeriksaan, sekiranya itu memerlukan sesuatu persetujuan internal terlebih dahulu supaya kita tahu karena belum pernah, ini baru karena usulan pak ketua saja, ide pak ketua. Jadi kiranya perlu kita bicarakan dulu secara internal. Sepedengarannya saya tadi apa yang sudah dilakukan oleh pak menteri semua itu ditindak lanjuti dengan baik dan bahkan sudah ada yang selesai temuan-temuan bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin nanti kita bicarakan dulu. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT :

Baik pak, saya kira jalan keluar. Kalau kita mau selesaikan hari ini, saya kira tidak akan bisa karena kita harus menghormati bahwa ada rapat dengan presiden. Saya malah khawatir kalau nanti dilanjutkan ini bisa kita sampai malam sekarang ini pak. Tadi kami mencoba berunding dengan pimpinan, menawarkan solusinya pak. Tetapi kalau silakan teman-teman kalau ada yang mau mengusulkan, silakan Pak Anton dulu atau Pak Jhoni.

F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING) :

Terima kasih pimpinan.

Pak menteri dan seluruh jajarannya.

Saya rasa kita sepakat kalau sekarang kita bahas tidak mungkin. Kita cari waktu nanti eselon I yang kita anggap ada keterkaitannya. Saya minta izin mau ke Papua Nugini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Anton, setuju pak ya kita akan? ini anggota yang ingin menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan kepada menteri. 12.30 WIB kita selesaikan dan kita lanjutkan nanti pada saat rapat dengan para eselon I. Pak Jhoni silakan pak.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Secara umum saya setuju dengan pak ketua. Tapi yang pertama dengan hasil WTP, saya kira.. namun dari ketiga kementerian ini tentu kita lihat dari hasil temuan besaran. Kalau besaran tolong Pak Menteri Perhubungan, paling besar itu Menteri Perhubungan. Kalau dilihat dibandingkan dengan kedua kementerian lain walaupun

secara umum WTP, khususnya juga ini supaya nanti pak menteri, Dirjen Perkeretaapian. Kemarin itu Dirjen Perkeretaapian itu saya lihat misalnya Bogor dibangun ruko kios tapi didalam anggaran ke dirjenan ada biaya pengamanan tanah. Bapak yang mengamankan tanahnya tapi yang menggunakan tanahnya adalah BUMN. Tolong ini seperti apa ini. Ini agak kita diperdalam supaya maksud saya. Supaya pak menteri khusus Dirjen Perkeretaapian dan juga saya lihat tadi itu Dirjen Perhubungan Laut. Nah ini untuk pak menteri. Nah yang lain saya kira masih seimbang. Nah ini titipan saya kepada Menteri Perhubungan. 2 dirjen tersebut agak sedikit tolong diperdalam supaya tahun-tahun berikutnya ada perbaikan-perbaikan didalam antara pembiayaan APBN kepada Kementerian yang sudah diserahkan kepada BUMN dalam ini Dirjen Perkeretaapian. Demikian pimpinan, ini hanya sekedar supaya pendalamannya lebih dalam. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih pak.

Jadi ini catatan-catatan kepada para eselon I, supaya nanti bisa menjelaskan dari para anggota. Pak Bambang Haryo, siap-siap Pak John Siffy Mirin.

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Izin kami yang ketiga pak, Izin.

Oh sudah yang ketiga ya?

Iya terima kasih bapak pimpinan.

**Bapak ibu Anggota Komisi V,
Yang terhormat juga pak Menteri PDT, Pak Menteri PU dan Pak Menteri
Perhubungan beserta jajarannya.**

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Selamat siang.

Om swastyastu,

Namo Buddhaya Rahayu.

Terima kasih pak.

Kami pertama menghanturkan selamat kepada bapak-bapak yang telah menyelesaikan permasalahan laporan keuangan ini dengan baik. Dalam arti mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dan juga dari Kementerian PDT yang telah diberikan suatu penghargaan dari Kementerian Keuangan di 2018 sehingga ini menurut kami sangat bagus prestasinya. Kami hanya sebenarnya ingin menanyakan ada beberapa yang ingin kami tanyakan :

1. Kementerian Desa dulu pak. Kami melihat pak di desa ini masalah yang berhubungan dengan tata ruang desa, ini mereka mengatur sendiri dalam arti tata ruang desa ini tidak berdasarkan suatu tata ruang yang dikendalikan oleh pusat. Kalau kita dulu tahu pada zaman Belanda ada yang namanya *culture stelsel* yang dimana *culture stelsel* itu untuk mengatur suplai demand daripada hasil pangan kita pak. Berapa yang dibutuhkan dunia? Berapa yang dibutuhkan domestik? pada saat itu

belanda mengatur 15 % dari tanah rakyat itu dipakai untuk yang diregulasi oleh pemerintah sehingga akhirnya kita menjadi antara *supplai* dan *demand* daripada kebutuhan pangan kita itu bisa tercapai dengan baik. Kami ingin ada semacam riset atau studi ataupun Litbang yang mengatur hal tersebut. Jadi akhirnya bapak kita tidak ingin penataan ruang yang ada didesa itu menghancurkan semua tanah-tanah produktif kita yang akhirnya kita menjadi kesulitan berswasembada pangan dan tentu ini harus ada suatu kerja sama dengan kementerian yang lain, Kementerian PU. Karena Kementerian PU inikan juga ikut mengatur Pak Menteri PU, kami mohon maaf. Jadi ini kami yang menginginkan itu karena itu belum ada dalam program atau mungkin siapa tahu mungkin sudah ada diprogram itu.

2. Untuk Pak Menteri Kementerian Desa, kami tidak ingin desa itu anggarannya itu diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Percuma ada Kementerian Desa tapi kalau anggarannya daripada desa itu diatur dalam Kementerian Dalam Negeri pak. Sebagai contoh pak, kemarin dikeluhkan oleh desa, pasti desa ini tidak hanya didesa kami pak tapi didesa diseluruh Indonesia. Yang dimana kepala desa mengeluh dana operasional mereka itu sangat kurang ini diluar daripada anggaran tadi pak, mereka sangat kurang. Mereka menginginkan anggaran desa dana operasionalnya ada di atas posisi 30 %, karena sekarang ini diatur dalam posisi 30 % sehingga kepala desa sulit untuk melakukan suatu pengaturan operasional dan akhirnya mereka tidak produktif. Mungkin kemarin disarankan oleh Pak Kemendes bahwa bisa dilakukan dengan memberdayakan Bumdes. Tapi Bumdes mereka tidak semuanya sudah berjalan baik pak. Jadi ini yang akhirnya kami kok menginginkan karena sudah ada Kementerian Desa, anggaran desa yang mengatur dari sisi kebijakan dari Undang-undangnya. Jangan Kementerian Dalam Negeri karena kecuali kalau kita tidak punya Menteri Desa. Jadi itu yang saya mohon dari 2 pertanyaan dan mungkin ada semacam perubahan daripada mereka sehingga mereka produktif lebih besar. Yang kami usulkan pada waktu kemarin ke Pak Menteri Desa adalah 35% supaya mereka lebih banyak bergerak karena desa itu tidak dibelakang meja. Karena desa itu memang orang desa harus bergerak. Ini yang membutuhkan biaya yang cukup

Kami langsung ke Pak Menteri PU :

1. Jadi tadi juga sudah dibahas permasalahan yang berhubungan dengan ini semua yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri PU dari target-target itu termasuk masih memenuhi target dari pada penyelesaian itu pak. Hanya kami ini agak sedikit *tergelitik* pak dengan kritikan daripada asosiasi kontraktor Indonesia yang dimana pernah disampaikan bahwa 37.000 kontraktor di Indonesia itu mati pak, karena mereka tidak mendapatkan job atau mereka tidak dibayar oleh BUMN yang kita tunjuk oleh Kementerian PU. Ini apakah sudah ada satu solusi karena kontraktor-kontraktor ini kalau 37.000 kontraktor di 2017 akhir, saya tidak mengerti apakah ada suatu target di 2018 kemarin itu untuk menghidupkan mereka kembali. Jadi ini yang sangat-sangat ironis, kita lagi istilahnya banjir dengan project infrastruktur, malah kontraktor kita yang mati semua.
2. Di 2017/ 2018 dalam anggaran ini kami juga melihat adanya suatu peningkatan yang luar biasa dibanding dengan 2012 terutama dalam pembangunan daripada infrastruktur ini. Tapi begitu kami melihat data daripada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan heran juga pak.

Kebutuhan semen atau pembelian semen dari mereka baik itu domestik maupun impor itu hanya naik 10 % pak. Ini mungkin apakah datanya yang salah atautkah kita ini kurang maksimal pak? kalau kita lihat dari infrastruktur di 2012 itu masih 150 triliun kira-kira pak, sedangkan kita sekarang ini 420 triliun ditambah dana desa yang demikian tinggi sekitar naik 400 % harus semen kita harus naik 400% juga. Baja juga begitu pak, baja juga dengan ditahun yang sama itu hanya naik sekitar 40 % pak. Nah ini coba mungkin perlu adanya suatu kajian pak daripada Litbang bapak untuk mengkaji ini kenapa kenaikannya ini hanya kecil sekali? ini keterkaitan dengan anggaran kita. Saya tidak ingin data ini salah misalnya, juga tidak ingin kalau ini benar akhirnya saya bisa mengatakan apakah *project* ini abal-abal, tapi tidak mungkin kalau abal-abal pak karena saya juga melihat project itu. Tapi yang kedua, apakah *project* ini asal-asal, ada 2 macam pak, abal-abal dan asal-asal. Kalau asal-asal berarti mutunya yang kurang bagus. Semoga-moga ini salah dalam data itu, nanti bapak bisa koreksi kalau misalnya itu salah karena ini masuk didalam media sosial.

Lalu kalau kami ingin menyampaikan juga pak, kemarin terjadi banjir yang luar biasa di Sulawesi. Ini adalah kesalahan prosedur menurut kita yang ada informasi dari media dan tadi bapak juga mengatakan kesalahan prosedur didalam melakukan suatu *sysflow* yang dimana akhirnya ini terbuka dan akhirnya membanjir ke. Kami ingin menanyakan pak, debit daripada air yang keluar daripada semua bendungan kita pak, itu apakah dihitung dengan baik oleh Kementerian PU? karena mohon maaf pak Bendungan Bili-bili ini mempunyai kedalaman 73 m dibangun tahun 1999 terakhir, bangunnya jadi diresmikan tahun 1999 dan sekarang ini kalau kami lihat pak kedalamannya tidak lebih dari. Kami kemarin cek langsung kesana, tidak lebih dari 20 meter, sehingga ini terjadi pengendapan yang luar biasa besar. Kami khawatir pak, ini menjadi kita tertipu dengan kondisi air kita yang seakan-akan kita ini berlimpah airnya. Ini masalahnya apa pak? untuk hidup seluruh penduduk di Sulawesi Selatan, jadi Pak Hamka, ada pak dan lain sebagainya yang dari Sulawesi Selatan, itu hidupnya air minumnya dari situ pak. Ini yang kami khawatir begitu kita keruk diposisi 73 meter ternyata airnya sangat kurang sehingga listriknya tidak bisa hidup dan mungkin bisa-bisa nanti kita kekeringan. Saya mohon pak, adanya suatu riset yang tentu ini harus kita lakukan dan yang berikutnya lagi, mohon maaf ini bapak pimpinan agak banyak

KETUA RAPAT :

Kalau teknis sekali nanti kita.

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Iya siap.

KETUA RAPAT :

Rapatkan dengan eselon I?

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Tapi ini agak masuk dalam permasalahan kebijakan. Saya mendengar kebijakan ini seharusnya dimasukkan kedalam program kita yaitu permasalahan KJA (Keramba Jaring Apung) yang dimana bapak memberikan masukan kepada. Itu rusak akibat keramba jaring apung. Kami juga ingin menanyakan mungkin adanya suatu pengecekan yang benar karena kami tahu permasalahan yang berhubungan dengan *kavitasi* turbin dia bisa mengalami pengkaratan/ pengkreposan akibat dari kimia. Jadi ini belum dilakukan survey sudah diputuskan rakyat yang di Waduk Jatiluhur itu bisa menghasilkan 2 triliun setiap tahun dari budidaya ikan. Sekarang tidak boleh mereka melakukan itu. Tolong pak ini dikembalikan karena ini akan multiplayer effect daripada ikan itu akan kerestoran, ini, itu dan sebagainya, Akan membawa dampak yang luar biasa kepada ekonomi Jawa barat, tidak hanya Jawa Barat, semua waduk-waduk kita stop. Ini terus terang Bu Susi ini asal tarik saja satu kebijakan. Jadi ini mungkin perlu diadakan satu research.

Yang terakhir tentu di Pak Menteri Perhubungan. Bapak di 2018 itu begitu banyak project Kementerian Perhubungan tadi sudah dikatakan termasuk Bandara Semarang, termasuk Bandara Kertajati, termasuk dan sebagainya-sebagainya. Yang kami tanyakan permasalahan yang berhubungan dengan Bandara Kertajati. Bandara Kertajati ini kita minta dari petani 2.000 hektar dengan perjuangan petani itu sampai mati-matian. Mereka berapa yang terluka dan matanya juga kena gas air mata dan banyak sekali yang mengalami kesulitan untuk melihat sampai kurun waktu yang cukup lama pak.

Saya mengerti pada waktu itu pak. Ini tidak bisa dibiarkan pak, tapi apa boleh buat pada waktu itu kepala desa sudah mengatakan yang menyetujui permasalahan itu. Ini permasalahan ini pak, bandara yang demikian hebat ini kita perjuangkan dan rakyat juga memperjuangkan karena 2.000 hektar. Kalau di Pak Menteri Desa 1 hektar itu bisa menghasilkan 8 ton atau sekitar 10 ton gabah atau padi. Ini pak dikalikan 3 dikalikan 2.000 ini yang kita korbankan pak. Kalau kita lihat di kota Beijing, tengah-tengahnya kota itu ada sawah yang tidak digunakan sama sekali untuk dibangun. Saya tanya untuk apa ini? ini adalah tanah produktif yang tidak kita bangun apapun juga disitu, luar biasa. Ini yang saya tanyakan pak, Bandara Kertajati ini bisa dipakai atau tidak? karena saya sudah mendarat disana, saya ajak direktur citilink yang mengatakan sulit karena penumpangnya sepi sekali dan ini sempat sampai mereka berhenti total. Sampai detik ini, bandara itu tidak digunakan sama sekali. Ini yang terus terang petani banyak yang menangis, menangis semua pak. Jadi ini yang saya mohon adanya suatu pertanyaan kami dan ini saya mohon untuk segera ditindak lanjuti, mau diapakan. Kalau misalnya bandara itu tidak bisa dipakai, bisa dirubah pak milik angkatan udara yang ada di Halim, angkatan udara dipindahkan saja di Kertajati. Sudah selesai pak, sedangkan halim perdana kusuma full untuk kepentingan domestik. Jadi ini yang kami ingin realisasikan jadi jangan sampai nanti.

Terus tadi bapak juga membeli 51 pesawat pak, latihan, betul pak ya? terus terang kok amat kita sayangkan pak. Kenapa pesawat latihan itu tidak dibeli dari north *tanio*? kita punya produk industri pesawat yang luar biasa pak dan kami mohon maaf pak menteri, saya terus terang yang paling tidak setuju untuk bandara-bandara ini untuk diperbanyak lagi untuk internasionalnya. Pelabuhan-pelabuhan ini diperbanyak lagi untuk internasionalnya. Kita ini pelabuhan internasional 141, Amerika yang besarnya 9 juta kilometer persegi, kita cuman 5 juta. Itu pelabuhannya? Internasionalnya? lautnya? Eropa itu hanya 7 pak. Jadi ini yang

KETUA RAPAT :

Pak Bambang?

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Izin pak.

KETUA RAPAT :

Kita kembali fokus ke.

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Siap-siap.

KETUA RAPAT :

Ke BPK pak.

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Jadi kami mohon anggaran-anggaran ini termasuk di 2018 sudah terlalu banyak runway-runway yang kita perpanjang yang dimana tidak sesuai dengan PJN-nya, terus tentu ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana memberdayakan *north tanio*. Jadi jangan semuanya jetinisasi, pesawat jet semua, saya tidak setuju pak. Di Jepang saja masih pakai pesawat baling-baling pak dari Nagasaki ke...

Jadi ini yang kami sampaikan pak, semoga ini bisa ada, nanti mungkin secara detail kami akan sampaikan kemudian pak. Terima kasih pak menteri, mohon maaf kalau saya mungkin menyampaikan ini apa adanya pak, karena saya sedih kalau misalnya apa yang kita inginkan untuk, terus terang kami ingin Indonesia ini semakin maju disaat saya masih menjadi Anggota DPR pak. Kita tidak tahu apakah dipemilihan nanti saya tetap masih menjadi Anggota DPR atau tidak? saya tidak tahu, semoga kita masih ada waktu sekian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hom santi-santi om.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Bambang.

Pak John Siffy, siap-siap Pak Yoseph Umar Hadi.

Silakan pak.

F-PAN (JOHN SIFFY MIRIN) :

Yang saya hormati pimpinan,

Yang saya hormati Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Desa,

Bapak/ ibu Anggota yang saya hormati.

Shaloom.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-pertama saya atas nama John Mirin, Nomor anggota 505 secara pribadi menyampaikan prihatin dan turut berduka atas peristiwa di Nduga Kali Yigi karena 31 pekerja yang di terjadi...disana dan itu yang pertama. Yang kedua atas nama apapun dan siapapun yang menghilangkan nyawa manusia hidup adalah tetap pelanggaran HAM baik...untuk menghilangkan nyawa manusia hidup, dua-duanya pelanggaran HAM.

Yang ketiga itu, trauma panjang yang dialami masyarakat Nduga tentu saja peristiwa Kali Yigi. Peristiwa ini sudah lama sejak 1996, timloren 1996 itu, yang kedua, penembakan pesawat trigana. Yang ketiga baru peristiwa Kali yigi. Dan ini saya secara pribadi berharap trauma ini harus diatasi secara baik, masalahnya masyarakat Nduga itu mayoritas memiliki KTP(Kartu Penduduk Indonesia), mereka adalah warga negara Indonesia. Saya baru dari sana dari Papua dan banyak sumber yang saya dapatkan. Akses pendidikannya tidak jalan, akses kesehatannya tidak jalan, masyarakat dihutan, tidak makan, tidak minum, banyak orang melahirkan di hutan, ada 9 orang lebih melahirkan di hutan dan ini sangat memprihatinkan. Kalau mereka adalah warga Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk, negara wajib hadir dan mengatasi. Yang kedua, masyarakat disana mereka tahu yang namanya Pancasila dan Undang-undang Dasar 45, sila kedua berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab", apa nilai-nilai kemanusiaannya?jadi mulai sekarang kita harus berpikir bagaimana cara kita mengatasi masalah ini. Saya diberikan saran oleh beberapa orang di Papua kalau atas nama pembangunan, negara hadir membawa malapetaka lebih baik pembangunan itu sementara diberhentikan. Lebih baik kami hidup tapi aman, nyaman dan menikmati apa yang tuhan kasih di alam mereka. Nah ini trauma jangka panjang yang kita harus mengobati negara hadir disana dan saya kira mengatasi.

Saran saya langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan sekarang :

1. Saya minta kepada Menteri Perhubungan memberikan akses yang lebih mudah kepada seluruh maskapai penerbangan, pesawat printis untuk membantu bahan makanan logistic apapun yang tim atau dari mahasiswa, relawan sudah siapkan tapi mereka tidak dapat akses masuk ke Kali Jigi karena tekanan intimidasi dan lain-lain luar biasa. Sekolah saja bisa digunakan untuk tempat tinggal aparat, nanti besok lagi rumah sakit bisa dijadikan sama juga. Semua akses media sudah tertutup rapat tidak ada yang bisa dibongkar keluar. Itu yang pertama.
2. Ada tim investigasi yang dibentuk oleh Pemda Provinsi berdasarkan laporan, mereka hanya turun memberi makanan, sembako dan lain-lain. Mereka tidak melakukan tugas yang sesuai dengan SK yang diberikan gubernur untuk mencari fakta yang benar seperti apa kondisi yang ada di Nduga.
3. Saya minta kepada Pak Menteri PUPR dan Menteri Desa dan Menteri Perhubungan kalau kedepan paket-paket proyek tahun 2019 berikan rasa keadilan bagi orang Papua. Mereka dilibatkan paling minimal kalau tidak bisa bekerja kasih subkon apalagi kalau didaerah-daerah rawan. Kalau mereka jadi subkon, pasti mereka akan jaga. Nah ini kami sedang ikut libatkan, mereka bisa menjadi inteligen. Ini tidak boleh ada ancaman dan gangguan lain-lain. Ini yang ketiga.

4. Kepada Pak Menteri Perhubungan peningkatan status Bandara Sentani diserahkan kepada Angkasa Pura (dari BUMN) itu asosiasi semua buruh dan juga semua elemen disana menolak.
Terima kasih, saya rasa cukup sekian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak John.
Pak Yoseph Umar Hadi, siap-siap Pak Abubakar Wasahua.
Silakan pak.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si) :

Terima kasih pak ketua.

**Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang saya hormati,
Bapak-bapak menteri dengan seluruh jajarannya yang kami hormati,
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pertama terkait dengan laporan hasil pemeriksaan semester dari BPK terhadap ketiga mitra kerja kita ini, kami menyampaikan aspirasi atas upaya dan respon positif yang telah ditunjukkan oleh ketiga kementerian ini benar-benar menindaklanjuti dan memperbaiki segala rekomendasi maupun temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK dengan progress penyelesaian yang kiranya hanya tinggal beberapa temuan-temuan atau rekomendasi yang kiranya mungkin dalam waktu segera atau dekat akan bisa diselesaikan. Saya kira itu patut apresiasi atas kerja keras ini. Saya tidak berbicara detail tentang point-point dari rekomendasi maupun temuan tersebut, nanti akan ada waktunya kata pak ketua silakan, dan tentu ini semua tentu dalam pengertian bahwa kita betul-betul ingin mitra kerja kita ini dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan anggaran dan pembangunan itu betul-betul baik dan tidak ada celah itulah harapan kita karena tentu saja prestasi yang dicapai oleh ketiga kementerian ini juga merupakan prestasi Komisi V, jadi tidak bisa kita lepaskan keberhasilan maupun juga kelemahan dan kekurangan tentu saja sedikit banyak itu menjadi kekurangan kita dan menjadi rasa kita ikut serta didalam andil baik dan buruknya ketiga kementerian ini. Saya kira ini posisi yang saya kira demikian yang memang selama ini antara kita Komisi V dengan mitra kita ini berjalan bersama-sama. Itu yang pertama.

Yang kedua, sekiranya tidak bisa diperdebatkan atau tidak bisa dibantah bahwa kinerja ketiga kementerian ini fisik dan pembangunan itu kita acungin jempol, kita apresiasi. Dan ini merupakan wajah dan muka daripada pemerintahan sekarang tetapi juga sekaligus merupakan wajah dan muka kita di Komisi V kebanggaan dan kinerja yang telah dicapai oleh ketiga menteri ini tentu juga merupakan prestasi kita semua sebagai Anggota Komisi V, karena kita inilah yang selama ini mengawal dan menetapkan dari sisi kebijakan, dari sisi penganggaran maupun dari sisi pengawasan. Semua sudah kita lakukan semua sehingga tidak mungkin dengan

penuh seakan-akan ketidakpuasan kita sampaikan kepada hal-hal yang kiranya memang sangat spesifik itu tidak mengurangi apresiasi kita kepada ini. saya kira hanya orang yang memiliki fatamorgana yang tidak mengakui keberhasilan daripada pembangunan infrastruktur ini menurut pendapat kami. Jadi itu secara fisik dan secara kuantifikasi dan kasat mata dan dirasakan, dialami dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada ini saya kira hanya mereka yang berpikir yang lain atau memiliki fatamorgana, tidak bisa mengakui keberadaan ini. Ini saya kira pantas kita apresiasi sekali. Saya hanya menyampaikan, saya tidak kembali menyebutkan ketiga kementerian ini menjelaskan bagaimana pencapaian target-targetnya yang dicapai baik Kementerian PU, Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Desa bahkan melebihi daripada target rata-rata dan ini suatu prestasi yang pantas kita ancungkan jembol. Saya tidak menyebutkan mana-mananya waktunya akan tentu panjang lebar. Bahwa masih ada kekurangan disana sini atau kesempurnaan tidak sempurna itu suatu yang wajar. Mari kita bersama –sama menyampaikan bersama-bersama mencari solusi, bersama-sama memberikan masukan agar pembangunan itu betul-betul nanti bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia ini.

Saya atas nama masyarakat Jawa Barat Pak Menteri Perhubungan saya menyampaikan terima kasih telah dibangun Bandara Kertajati sangat bermanfaat itu pak. Betul itu sudah lama merindukan masyarakat Jawa Barat mendapatkan bandara itu, bukan maunya bapak tapi ini maunya masyarakat Jawa Barat, waktu Bapak Gubernur Bapak Heryawan, selaku Gubernur Jawa Barat itu dengan terus menerus meloby kita. Bahkan sebenarnya Menteri Perhubungan pun tidak mengizinkan itu. Tetapi permintaan begitu kuat dan dapat dukungan dari seluruh Anggota DPR RI yang ada di Komisi V dari Jawa Barat termasuk saya, bahwa memang lokasi dan penetapan bandara itu ditempat dimana banyak tempat-tempat lahan produktif pertanian itu adalah suatu resiko yang memang bukan kemauan dari pusat tapi itu adalah kehendak dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Saya senang bahwa itu tidak benar kalau tidak ada penerbangan. Saya sendiri sudah terbang dari Yogyakarta ke Kertajati. Dan itu membantu sekali, bahkan juga masyarakat yang melakukan ibadah untuk haji dan umroh itu juga sangat terbantu dimana memiliki mereka bisa melakukan penerbangan dari Kertajati menuju kota suci di Mekkah sana dan tentu akan sangat melengkapi bagaimana Jawa Barat ini tidak hanya nanti akan memiliki pelabuhan sendiri yaitu pelabuhan Patimban ditambah lagi dengan bandara ini maka semakin lengkap jalan tol sudah terbangun dengan baik. Kemarin saya dari Jogjakarta ke Cirebon itu 4 jam, terima kasih Pak Menteri PU. Jadi ini saya kira juga semua menyampaikan pujian dan hanya mereka yang berpikir lain yang tidak memuji itu. Jadi saya terima kasih, saya sendiri mengalami itu. dan memang suatu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah angka kecelakaan, karena itu memang banyak yang tidak sadar sampai kecepatan tinggi dan itu memang harus ada satu langkah-langkah yang baik, upaya untuk mengurangi apalagi yang mau kita. Tol laut peningkatan dari tahun ketahun, saya melihat sangat signifikan. Bagaimana trayek tol laut kita meningkat dari tahun ketahun, diantaranya untuk perintis saja meningkat dari 11 menjadi 18 tol laut, 113 trayek ini tentu sangat membantu. Hampir semua daerah ini terhubung oleh laut maupun udara. Jalan juga demikian, bahkan prestasi dari pak menteri bagaimana pembangunan jembatan, pembangunan jalan baru melebihi daripada target yang ditetapkan. Ini satu hal yang kiranya perlu memang kita angkat dan perlu kita apresiasi, meskipun memang masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan perbaiki.

Kereta api juga demikian, mungkin kedepannya pak menteri setelah jalan darat dan kereta api, double track secepat dapat kita selesaikan. Jakarta-Surabaya juga sudah selesai, tinggal lintas selatan yang perlu kita selesaikan. Jalur-jalur yang tidak aktif kita sudah aktifkan, terima kasih juga. Ada kereta api dari sini menuju pangandaran. Ini adalah hal-hal yang kiranya tentu disini lain perlu kita apresiasi karena keberhasilan bapak-bapak menjadi kebanggaan kita semua di Komisi V yang selama ini mengawal dan memberikan dukungan didalam pembangunan itu.

Mungkin satu untuk Pak Menteri PU terkait dengan perumahan pak. Saya melihat dari beberapa laporan atau prestasi yang dicapai, kelihatannya memang kedepannya kami mohon untuk lebih diperkuat lagi. Untuk perhatiannya terhadap masalah perumahan ini mengingat keinginan masyarakat untuk mendapatkan rumah swadaya ini baru sekitar 30/40 % dari target 2019 ini. Padahal ini sangat membantu dan menolong bagaimana masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni dan saya kira kebijakan kearah sana sudah kelihatan hanya mungkin lebih diperkuat lagi termasuk diantaranya juga rumah-rumah khusus, juga mungkin target masih belum 50 %, untuk rumah rusun juga demikian, tetapi saya melihat sudah menuju kearah sana. Kenapa saya membicarakan soal perumahan?karena ini merupakan satu kebutuhan mendasar yang memang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu kesejahteraan dari sisi tempat tinggal. Nah ini tentu saya berharap kebijakan yang lebih besar lagi kepada masalah sektor perumahan ini. Kemudian untuk Cipta Karya juga demikian saya kira untuk mempercepat atau memperbaiki kinerja seyogyanya ada kepala balai di perumahan maupun juga Cipta Karya. Selama ini kita berkomunikasi dengan provinsi maupun kabupaten ini kadang-kadang kita tidak bisa langsung melakukan pengawasan dan pengawalan atau usulan sehingga kita bisa melihat prestasi-prestasi dari sisi keciptakaryaan ini maupun perumahan ini.

KETUA RAPAT :

Pak Yoseph

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si) :

Yang terakhir pak untuk Kementerian Desa, jadi program-program stimulan yang bapak-bapak berikan ini sungguh sangat bermanfaat menurut saya pak. karena memang danya tidak banyak tetapi sudah memberikan stimulasi yang baik untuk kegiatan perekonomian didesa-desa ini. Saya hanya satu menambahkan saja sekarang ini lagi booming untuk desa-desa lebih ingin menonjolkan diri dengan membangun daerah-daerah tujuan wisata pantai maupun juga kuliner maupun juga situs-situs untuk rohani, ini saya kira perlu dukungan apakah aksesnya, apakah lokasinya atau mungkin juga ekonominya untuk ditingkatkan untuk itu. Hanya saya mengharapkan demikian dan Bumdes mungkin lebih banyak diperkuat juga supaya Bumdes ini menjadi semakin lebih berdaya guna untuk menggerakkan ekonomi didesa-desa itu. Saya rasa demikian pak ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yosep.

Seperti yang saya sampaikan bahwa kita masih perlu rapat untuk pendalaman pak setelah ini. Pak Bambang dan Pak Yosep ini saja waktu ½ jam pak. Pak Bambang memberikan catatan-catatan.

ANGGOTA DPR :

Pak ketua lama mana Pak Bambang atau Pak Yoseph?

KETUA RAPAT :

Hampir samalah.

Jadi Pak Bambang ini memberikan catatan dan mengkritisi, Pak Yoseph memberikan apresiasi. Ini kalau semuanya seperti itu kita sampai malam pak. Maka saya, kami sebagai pimpinan tadi menyampaikan, sudah kita berikan apresiasi kepada pak menteri dari hasil kerjaan tetapi catatan itu kita perlu dibahas dan dalam dengan para eselon I. Kalau saya tidak mengingatkan seperti tadi ini ini nanti Pak Jhoni, ini ... turun tangan bisa ramai juga begitu pak. Jadi, oke.

ANGGOTA DPR :

Pak ketua jangan lari dari substansi pak ketua, lanjut.

KETUA RAPAT :

Jadi kita 12.30 WIB kita cabut lagi, kita 15 menit dari sekarang kita tutup ya? jadi masing-masing saya beri 3 menit ini ada 4 orang ini. Setuju ya? sebenarnya nanti.

F-PDIP (ALEX INDRA LUKMAN):

Pak ketua, saya daftar.

KETUA RAPAT :

Pasti Pak Alex, tapi kalau mau daftar tolong ini cabut dulu pak. Silakan Pak Yoseph, tadi Pak Jhoni Allen, Pak Abubakar. Sudah ya Pak Abubakar? terus Ibu Intan. Pak Alex minta terakhir pak. Silakan Pak Abubakar.

F-PPP (Drs. H. ABUBAKAR WASAHUA, SH, MH):

Assalammualaikum Warahmatullahi Warakatuh.

Dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Bapak pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak menteri mitra kerja Komisi V beserta seluruh jajaran,
Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.**

Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa penjelasan ketiga menteri ini cukup memadai tetapi sayangnya dari penjelasan-penjelasan bapak menteri masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, apalagi dari penjelasan itu ada berbagai temuan-temuan yang kemudian ditindak lanjuti dengan rekomendasi dan rekomendasi yang diarahkan itu sepertinya belum tuntas, belum selesai. Oleh

karena itu, ini kemudian menimbulkan kesan bahwa masih ada berbagai hal yang perlu diseriusi, dilaporkan secara lengkap.

Yang pertama saya ingin arahkan pertanyaan saya kepada Bapak Menteri Pembangunan Desa, bahwa apa yang bapak sampaikan tadi cukup bagus tetapi berkaitan dengan penggunaan dana desa itu laporannya belum secara hollistic. Penggunaan dana desa belum dilaporkan laporan secara menyeluruh tentang dan ini yang sangat kita nanti-nantikan karena dana desa itu adalah anggarannya yang tidak sedikit, yang jika kita melakukan pemantauan itu sepertinya penggunaannya itu menjadi membias tidak terfokus pada tupoksi anggaran yang dimaksud. Oleh karena itu, sangat-sangat dan sangat penting bapak menteri menjelaskan itu karena hari ini kita berkumpul untuk mengevaluasi kinerja bapak terkait dengan penggunaan dana desa.

Yang kedua kepada Bapak Menteri Perhubungan, kalau saya melihat laporan bapak itu ada kalau tidak salah ada 74 kasus yang berorientasi merugikan negara dan 74 kasus itu terdapat sebagian yang sudah dianggap tuntas, tetapi sebagian yang belum tuntas. Ini barangkali perlu dijelaskan secara transparan, kegiatan-kegiatan yang belum tuntas itu seperti apa?saya berharap bapak jangan hanya memberikan laporan tentang perkembangan-perkembangan yang nilainya positif. Kemajuan-kemajuan yang bapak raih selama tahun 2018 misalnya. Saya berharap laporan bapak itu harus lengkap tidak hanya menyampaikan yang bagus-bagus, yang tidak bagus juga bapak harus sampaikan. Ini mungkin juga harapan ini, saya harapkan dapat dilakukan oleh bapak menteri yang lain termasuk Bapak Menteri PUPR

Yang kedua masih untuk Bapak Menteri Perhubungan, saya ingin mengkonfirmasi saya tidak tahu yang saya ingin konfirmasi ini sudah di sentil oleh kawan-kawan yang lain sebelum kesempatan ini, tapi saya merasa penasaran kalau saya tidak sampaikan. Berkaitan dengan kenaikan tarif pesawat. Itu bapak dikesankan sebagai biang keroknya sebagai menteri yang memberikan support terhadap kebijakan kenaikan tarif pesawat akhir-akhir ini, termasuk penghapusan bagasi bebas itu juga bapak dianggap sebagai supporter pendukung utama. Mohon maaf pak menteri saya sampaikan ini karena informasi-informasi dilapangan yang kami temukan itu bapak menjadi bahan berbincangan. Menteri Perhubungan kok memberikan warning, meberikan ruang untuk hal-hal yang seperti itu, terkesan Menteri Perhubungan tidak berpihak kepada rakyat.

Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Menteri PUPR, mohon maaf pak menteri isu terakhir yang mengemuka dimedia, itu terdapat beberapa kasus yang menjadi temuan. Bapak mohon jelaskan kasus-kasus ini kenapa harus muncul sehingga ini kemudian dapat memberikan image bahwa kementerian PUPR tidak menghendaki munculnya kasus-kasus tersebut dan ini sangat berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja bapak menteri. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pak ketua. Terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Ibu Intan, siap-siap Pak Willem Wandik terakhir Pak Alex.

F-PAN (HJ. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., LLM):

Terima kasih pak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati pimpinan dan Anggota Komisi V,
Pak menteri dan beserta jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian
PUPR, dan Kementerian Desa PDT.**

Kita apresiasi hasil opini WTP, namun dengan catatan dari paparan hari ini umumnya pak menteri lebih memaparkan kepada pencapaian 2018. Sementara kita tahu ada temuan BPK misalnya untuk PUPR senilai 43.5 miliar atas kekurangan volume terhadap pekerjaan barang atau jasa. Kemudian juga di Perhubungan belum efektifnya pengelolaan konsesi pelabuhan. Oleh karena itu, tadi kita sepakat bahwa pembahasan nantinya ada di eselon I yang terkait sesuai dengan tupoksi kami Anggota DPR, kami bicara budgeting tidak bisa sampai satuan tiga. Tapi tidak demikian dengan pengawasan, oleh karena itu mohon kepada bapak dan ibu Dirjen nantinya menyampaikan deskripsi program beserta pagu alokasi anggaran perprogram untuk bahan evaluasi dan pengawasan kami. Terima kasih.

Wabillahitaufiqhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Intan. Penting pak catatannya untuk kita bahas nanti pada saat dengan para eselon I. Pak Willem terakhir Pak Alex Indra. Silakan pak.

F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Baik terima kasih.

Langsung saja dari kami kepada

1. Kementerian Perhubungan, dimana kami melihat dalam pemaparan tadi itu ternyata naik sebesar 9.06% yaitu dari 41.4 triliun ditahun 2017 menjadi 45.15 triliun ditahun 2018. Saya lihat dari angka realisasi belanja ini justru hampir sama bahkan jauh lebih tinggi nilai realisasi belanja dibandingkan penambahan penerimaan atau pendapatan kementerian ditahun 2018 yang hanya sebesar 8.59% angka ini setelah penyesuaian dengan *konstan* target ditahun 2017 untuk melihat secara *real* dan *ekuivalen* nilai tumbuh pendapatan di Kementerian Perhubungan.
2. Masih kepada Kementerian Perhubungan, kami juga sangat mengharapkan tentunya pada saat pertemuan-pertemuan yang lalu kami selalu mengharapkan supaya kalau melakukan distribusi bantuan bis, kapal atau pesawat model apapun tentunya kami selalu mengharapkan, kami ikut dihadirkan supaya bagaimana masyarakat kita konstituen kita disana bisa merasakan sukacita, dan ada kebanggaan dimana wakil mereka diikutsertakan. Tapi sampai hari ini mau berakhirnya RPJM kita 2015-2019 ini saya belum melihat dan belum pernah juga kami dilibatkan.
Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada :

- a. Kementerian Perhubungan, Dirjen dan Direktur Perhubungan Udara dan Kepala Bandara Timika yang mana belum lama kami telah kordinasi terkait dengan misi kemanusiaan dimana kami minta dukungan setelah kami siapkan sembako untuk membantu warga pengungsian di distrik Parodan Mependuma Kabupaten Nduga pasca *accident* disana, kami telah direspon cepat sehingga distribusi sembako ini segera dilakukan sehingga sampai kepada sasaran. Walaupun setelah 3 hari kemudian ada *accident*, ada penyerangan dari TPN OPM kepada Anggota TNI/Polri dan juga kepada... tetapi itu 3 hari kemudian setelah bantuan logistik kami sampai. Jadi dalam hal ini kami juga menyampaikan turut berbela sungkawa, tertembak prajurit TNI disana pada kesempatan itu. Dan saya ralat sedikit, korban pekerja disana bukan 31 tetapi yang sebenarnya 16 orang tetapi sampai sejauh ini yang menjadi korban adalah warga sipil atas *accident* itu dan sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan yang jelas terkait kerja-kerja daripada institusi negara atas target pengoperasian terhadap TPN-OPM atau kelompok kriminal disana, sampai sejauh ini kami belum mendapat laporan secara detail.
- b. Kami juga turut memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dimana pada tahun lalu kami turut diundang, turut dilibatkan melakukan kunjungan kerja di bulan Desember tahun 2018 di Kabupaten Merauke bersama Dirjen Perhubungan Kawasan Transmigrasi, Pak Nurdin yang budiman, yang dikasih tuhan beserta Direktur Promosi dan Kemitraan dan Direktur Sarana dan Prasarana dan juga kerja sama intiplasma terhubung perkebunan sawit yang memukimkan penduduk Suku Gun n dan Suku Marind suku asli di Kabupaten Merauke dan 2019 ini 297 kepala keluarga akan kebagian dan kami punya catatan disini tindak lanjut hasil BPK semester 1 tahun 2018 tapi akan kami eksplor nanti pada saat pertemuan dengan eselon I dan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2018 isu kinerja Kementerian PDT Transmigrasi Desa dimana per 1 Januari 2019 realisasi anggaran Kementerian Desa cukup bagus sebesar 93 % dari pagu 5.8 miliar. Berarti ada peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang lalu hanya menyerap...meskipun lebih kecil

(REKAMAN RAPAT TIDAK TEREKAM)